



# BULETIN



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Papua  
2023**



## PENGANTAR REDAKSI

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Segala Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenaanNya sehingga Buletin Bappeda Provinsi Papua Edisi 5 Tahun 2023 dapat diterbitkan.

Tujuan dari hadirnya Buletin ini untuk mempublikasikan data dan informasi aktivitas kegiatan kinerja Bappeda Provinsi Papua. dengan harapan dengan Adanya Buletin ini dapat memberikan manfaat tambahan tentang perencanaan pembangunan daerah provinsi Papua.

Kami menyadari keterbatasan kami dalam penyusunan buletin ini sehingga kami berharap adanya masukan, saran kritik yang membangun untuk perbaikan mutu buletin ini diwaktu mendatang.

Akhirnya Semoga Buletin ini bermanfaat, selamat Membaca!

Semoga Tuhan Memberkati kita semua.Amin.

<https://bappeda.papua.go.id/>



## Daftar Isi

- 1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Sosialisasi Tambahan Penghasilan PNS dan Sosialisasi Jabatan Fungsional Bidang Kepegawaian
- 3 Rapat Koordinasi Teknis (Rakortekda) Provinsi Papua Program Kerjasama Pemerintah RI-Unicef Periode 2021-2025 Tahun 2023
- 5 Kegiatan Pengumpulan Dan Pemeriksaan Daftar Data Dan Wali data SKPD
- 7 Rembuk Stunting dan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Kab/Kota Se-Provinsi Papua Tahun 2023
- 9 Rapat Koordinasi TPPS dan Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023
- 10 Kegiatan Monitoring Meja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023
- 11 Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan SKP dan Sosialisasi Simpeg
- 12 Pendampingan Penyusunan Proposal Satuan Inovasi dan Penginputan Indikator Indeks Inovasi Daerah di Lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023
- 13 Simtaru Provinsi Papua Tahun 2023
- 15 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Melalui Sistem TP2K(Tim Pengendalian Program dan Kegiatan)
- 16 Pembangunan Ekonomi Inklusif: Upaya Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
- 19 Kunjungan Pejabat Gubernur Papua di Kabupaten Supiori Dalam Rangka Peninjauan Program Penurunan Stunting
- 21 Rapat Koordinasi Papua Integrasi Satu Data Provinsi Papua Tahun 2023
- 23 Pembangunan Di Masa Kepimpinan Bapak Lukas Enembe di 5 (Lima) Tahun Terakhir
- 31 Dialog Dalam Rangka Mendorong Pembangunan Berkelanjutan Rendah Karbon di Provinsi Papua
- 32 Serba-serbi..

## REDAKSI

**Penanggung Jawab**  
Yohanes Walilo, S.Sos.,M.Si

**Pimpinan Redaksi**  
Verra A.P Wanda, ST., M.Si

**Sekretaris Redaksi**  
Robeka P. Mansnandifu, S.Sos., MM

**Redaktur Pelaksana**  
Henry David Maspaitella, S.STP, M.Si  
Dr. Agustinus Hartopo, SPD., MM  
Hery Wahyudianto BP, SE, Mm  
Merlina Hamadi, SE., MM  
Najib Suaery, SE., MM

**Peliput Berita**  
Novita Hana Mramra, SE  
Mikha Bukorpioper  
Syaiful MUSAAD

**Editor**  
Novi Agaki, S.S  
Zeth F. Wary, SE  
Muhammad Harrys Usman, S.Kom

**Layout & Desain Buletin**  
Yanu Misdianto, S.Kom  
Indra Rukmana, S.Kom

**Administrasi**  
Elisabeth S. Lumingkewas  
Donny O. A. Renmaur, S. STP  
Soleman Aninam, S. IP  
Sri Asyuni, SE



# Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Sosialisasi Tambahan Penghasilan PNS dan Sosialisasi Jabatan Fungsional Bidang Kepegawaian

**Jayapura** - Mewujudkan Papua yang bangkit, mandiri, sejahtera yang berkeadilan adalah salah satu Visi Gubernur Papua yang harus diwujudkan. Dengan merencanakan, menganggarkan serta membuat kebijakan untuk program/kegiatan yang dapat mensejahterakan Masyarakat Papua/ OAP serta tepat pada sasaran akan mengurangi atau mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat seperti masalah Pendidikan, Kesehatan bahkan Infrastruktur. Maka dari itu penting sekali adanya penyatuan pemikiran, perubahan kebijakan yang sekiranya perlu dilakukan dari Tata Kelola Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Pemerintah Provinsi Papua perlu bermusyawarah dan saling mengevaluasi kinerja pemerintah untuk pembangunan daerah. Oleh sebab itu, dilaksanakan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua sekaligus dalam rangka memotivasi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Papua agar lebih giat lagi bekerja serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan

mensejahterakan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri dilaksanakan juga bersamaan Sosialisasi Tambahan Penghasilan PNS dan Sosialisasi Jabatan Fungsional Bidang Kepegawaian di Lantai 9 Aula Kantor Gubernur dan Horison Ultima - Entrop pada 7 - 8 Juni 2023, Pukul 09.00 WIT. Pembukaan Acara ini dibuka langsung oleh Plh. Gubernur Papua Bapak Dr. Ridwan Rumasukun, SE, MM.

Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Plh. Sekda Papua, Bupati/Walikota, Narasumber BAPPENAS RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, BKN RI, Kepala Bappeda Kab/Kota, Kepala OPD Kab/Kota, Forkopimnda, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Para Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Pimpinan Non Government Organization, beberapa Wartawan Media Cetak dan juga Elektronik.

Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa "setelah terpisah dengan 3 (tiga) Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) mari bekerja dengan maksimal supaya bermanfaat bagi semua serta mengingatkan kembali agar hasil dari musrenbang otsus harus dilaksanakan secara nyata."

Perlu diingat kembali bahwa Musrenbang Otonomi Khusus dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Rencana Anggaran Program Provinsi Papua dan Evaluasi Rencana Anggaran Program Kab/Kota. penggunaan Dana Otonomi Khusus yang sukses dan tepat menjadi harapan kedepan, agar mengurangi pemborosan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan seharusnya.

Selanjutnya untuk sosialisasi tambahan penghasilan PNS dan sosialisasi jabatan fungsional beliau berpesan agar tata kelola pemerintahan juga mengalami perubahan dalam hal tertentu. Salah satunya adalah perubahan nomenklatur jabatan fungsional

dari Analis Kepegawaian menjadi Analis SDM Aparatur dan beberapa jabatan fungsional di bidang kepegawaian lainnya. Analis SDM Aparatur berfokus pada analisis, pengelolaan dan pengembangan SDM dalam konteks organisasi pemerintahan atau sector public. Analis SDM Aparatur memiliki peran penting yakni memastikan sebuah organisasi pemerintahan memiliki tenaga kerja yang berkualitas, terampil dan efektif dalam menjalankan tugas.

Harapan besar dari terselenggaranya kegiatan ini adalah Musrenbang Otsus dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan kerja yang nyata bagi pembangunan daerah. Serta perubahan jabatan fungsional dapat juga menciptakan kinerja yang efektif dalam hal sumber daya manusia serta mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang penuh dengan semangat dalam bekerja dengan adanya TPP.(\*)





# Rapat Koordinasi Teknis (Rakortekda) Provinsi Papua Program Kerjasama Pemerintah RI-Unicef Periode 2021-2025 Tahun 2023

**Jayapura** - Pemerintah Provinsi Papua lewat Kepala Bappeda Provinsi Papua Yohanes Walilo, S.Sos,M.Si Menyatakan bawa Kerjasama yang telah terjalin selama ini antara pemerintah RI dengan UNICEF bisa terjalin lebih baik dan semakin kontributif.

Kerjasama hingga 2025 ini khususnya di Provinsi Papua sebagai Provinsi Induk dan akan dilaksanakan beberapa Program kerjasama dan merupakan kelanjutan dari program kerjasama periode sebelumnya, dan kita tahu bahwa Angka stunting masih tinggi, angka APM/APK juga masih rendah serta angka kekerasan terhadap anak juga sangat tinggi serta semua Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua masuk dalam kemiskinan Ekstrem untuk itu Pemerintah Provinsi Papua sebagai Provinsi Induk berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dan komitmen positif dari Kabupaten/Kota Lokus program ini.

Lanjut Yohanes Walilo ada enam point penting yang dapat disampaikan pada kegiatan Rakortekda antara lain.

1. Program Gizi berfokus pada penanganan dan penurunan angka stunting melalui berbagai upaya untuk penanganan malnutrisi pada anak, yaitu pencegahan dan tatalaksana balita gizi buruk, perbaikan gizi ibu hamil, menyusui dan remaja.
2. Program Air dan Sanitasi (WASH) berfokus pada membantu pemerintah daerah untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat terkait praktek BAB (Buang Air Besar) sembarangan dan perilaku hidup yang bersih dan sehat (higienis) dalam bermasyarakat.
3. Program Kesehatan akan difokuskan pada peningkatan layanan bayi baru lahir



yang berkualitas, membantu penguatan system dan layanan Imunisasi dan eliminasi Malaria dari berbagai wilayah di Papua untuk mencegah dan menurunkan kejadian penyakit pada anak.

4. Program Pendidikan Untuk Anak Usia Dini, Literasi Kelas Awal, menggunakan model holistik dan integrative.
5. Program Perlindungan Anak (CP) akan terus fokus pada upaya membangun sistem perlindungan anak nasional untuk mencegah dan menangani kekerasan, perundungan atau bullying, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi.
6. Program lintas sektor yang juga menjadi prioritas adalah Kesiapan Darurat dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) secara langsung akan mendukung komitmen

nasional pada Kerangka Sendai untuk PRB 2015-2030, dan pekerjaan pemerintah untuk mempromosikan kesiapan darurat lintas sektoral yang kuat dan respon sesuai dengan Komitmen Inti UNICEF untuk Anak-anak dalam Aksi Kemanusiaan (CCC), dan untuk memperkuat ketahanan anak-anak, masyarakat dan sistem untuk bencana, perubahan iklim dan bencana lainnya.

Sambungannya, Dalam Rakortekda ini, Para SKPD Teknis dapat mengidentifikasi berbagai capaian, isu dan permasalahan pelaksanaan program Kerjasama di Provinsi Papua Tahun 2023, mengidentifikasi Kendala dan Solusi (Koordinasi, Monitoring dan Pelaksanaan) Program Kerjasama Selama ini di Provinsi

Papua, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan serta menyepakati solusi perbaikan atas pelaksanaan program Kerjasama di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tahun 2023, termasuk mendorong percepatan pencapaian target SDGS anak, Pendidikan dan Kesehatan sehingga dapat teridentifikasinya berbagai capaian, isu dan permasalahan pelaksanaan program Kerjasama di tahun 2023.

Melalui kesempatan yang baik ini, saya mengharapkan kepada para peserta Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mengikuti Rakortekda dengan harapan akan dihasilkan suatu rekomendasi penting dalam kelanjutan pelaksanaan Kerjasama ini yang selanjutnya akan dirumuskan dan disampaikan dalam Rakortek Tingkat Pusat.\*)





## Kegiatan Pengumpulan dan Pemeriksaan Daftar Data dan Wali Data SKPD

**Jayapura** - Kegiatan Pengumpulan dan Pemeriksaan dilaksanakan di Gedung Pusdalisbang Bappeda Provinsi Papua yang berlangsung selama 4 hari (31 Juli – 3 Agustus 2023). kegiatan ini dilaksanakan secara zoom yang wajib diikuti oleh semua wali data SKPD. Cara ini digunakan agar pengumpulan dan pemeriksaan daftar dapat secara efektif dilakukan bersama wali data SKPD. Beberapa SKPD yang telah merespon dan mengumpulkan dan memeriksa daftar data sebanyak 26 SKPD. Sedangkan SKPD yang merespon dan masih check list elemen data sebanyak 8 SKPD. Adapun kendala yang dihadapi oleh tim dari pusdalisbang yakni wali data yang memiliki kesibukan yang membuat tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian, ada koordinasi yang alot antara bidang di SKPD tertentu.

Pengumpulan dan pemeriksaan daftar data yang telah dilakukan akan melangkah ke tahap selanjutnya yakni penginputan. Penginputan data yang pada nantinya akan menentukan aplikasi PAITUA atau Papua Integrated Satu Data terisi ketersediaan datanya. PAITUA hadir guna mempermudah pemerintah Provinsi Papua mengambil kebijakan, menentukan program dan kegiatan serta mengukur pembangunan daerah Papua selanjutnya. Maka dari itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus lebih termotivasi dalam berkinerja khususnya dalam bidang data. Data sangatlah penting dalam mengukur kinerja SKPD. Dengan data, pemerintah dapat melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat Papua.

Perlu diketahui penyelenggaraan aplikasi PAITUA melewati tahapan-tahapan tertentu. Pertama, Perencanaan Data. Perencanaan

Data meliputi penyusunan daftar kebutuhan data, menyepakati bersama daftar kebutuhan data di forum PAITUA menjadi daftar prioritas yang ditetapkan dengan SK Gubernur dan penyusunan dan penetapan rencana aksi PAITUA. Kedua, Pengumpulan Data. Pengumpulan data meliputi pengumpulan data sesuai prinsip penyelenggaraan PAITUA, daftar data prioritas dan jadwal pemutakhiran/ rilis data, kemudian pengumpulan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder dan penginputan data ke dalam portal PAITUA dan penyimpanan dokumen secara fisik. Ketiga, Pengolahan Data. Pengolahan data meliputi Penyuntingan data, Pengkodean data, Pemeriksaan validitas dan kebenaran data dan pengolahan data disimpan dalam dokumen fisik. Keempat, Pemeriksaan Data. Pemeriksaan Data meliputi, Pemeriksaan Kesesuaian Data, Perbaikan Data, Analisis dan pengelompokkan

data, dan data tertutup/ rahasia dilakukan uji konsekuensi untuk disepakati dalam forum PAITUA dan ditetapkan dalam SK Gubernur. Kelima, Penyebarluasan Data. Penyebarluasan Data meliputi Penyebarluasan data yang disertai metadata, kode referensi dan data induk di Portal PAITUA, dilakukan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data dan penyebaran data juga dapat dilakukan melalui media lainnya.

Data pembangunan daerah harus mutakhir dan akuntabel. Selain itu data juga harus dapat dibagipakaikan. Oleh sebab itu, dukungan penuh harus diberikan dalam menghadirkan data. Wali data SKPD adalah salah satu support system. Jika koordinasi terus dilakukan secara baik, maka ketersediaan data dapat dihadirkan sehingga pembangunan daerah dapat terus berjalan yang bisa langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua.(\*)







## Rembuk Stunting dan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Kab/Kota Se-Provinsi Papua Tahun 2023

**Jayapura** - Pemerintah Provinsi Papua Kembali Menggelar Acara Rembuk Stunting Dan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Kab/Kota Se- Provinsi Papua Tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung Rabu (2/8) di Hotel Horizon Ultima – Entrop. Dihadiri oleh Ketua DPRD Papua, Forkopimda Provinsi Papua, Bupati/Walikota se-Provinsi Papua, Para Asisten dan Staf Ahli Sekda Provinsi Papua, Para Kepala SKPD Provinsi Papua, Kepala Bappeda Kab/Kota Se-provinsi papua, Kementerian Dalam Negeri, Instansi Vertikal dan Mitra Pembangunan

seperti UNICEF Papua dan Papua Barat, Para Tim Percepatan Penurunan Stunting, Tim Panelis Kinerja Konvergensi Stunting Provinsi Papua dan seluruh peserta Rembuk Stunting.

Berdasarkan hasil survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 menyatakan prevalensi Stunting Provinsi Papua menunjukkan angka 34,6% (dari 29 Kab/ Kota) dari angka sebelumnya yakni 25,6%. Stunting terjadi bukan hanya dipengaruhi dari faktor kesehatan ibu dan anak serta gizi anak saja, tetapi juga dari ketersediaan

air bersih dan sanitasi, jaminan sosial dan pola asuh. Maka dari itu, stunting dalam penanganan dan pencegahannya pun harus dilakukan secara menyeluruh dan memusat/ konvergen. Permasalahan stunting inilah menjadi fokus Pemerintah Provinsi Papua sehingga terlaksanalah kegiatan rembuk stunting dengan tujuan untuk menyampaikan capaian dan rencana program kegiatan yang akan dilakukan SKPD teknis terkait di tingkat Provinsi Papua untuk mendukung pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting di 9 Kab/Kota di Provinsi Papua kepada stakeholder dan untuk menyatukan komitmen

Dengan diadakannya kegiatan ini sekaligus menjadi forum/wadah yang dapat menghasilkan beberapa hal. Pertama, tersosialisasinya rencana program kegiatan Provinsi Papua Tahun 2023 dalam mendukung rencana program kegiatan

Kab/Kota fokus prioritas penurunan stunting di Provinsi Papua kepada seluruh stakeholder. Kedua, menghasilkan sebuah kesepakatan bersama dan terciptanya satu komitmen dari seluruh stakeholder penurunan stunting di provinsi papua. Ketiga, terlaksananya evaluasi kinerja konvergensi stunting Kab/Kota di Provinsi Papua dan terjadinya Implementasi kinerja konvergensi stunting kab/kota di tahun-tahun berikutnya.

Penanganan dan pencegahan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun juga tanggung jawab semua stakeholder yang ada dalam kegiatan ini dalam menyusun program kerja, dan mengambil langkah-langkah sebagai tindakan implementasi permasalahan stunting ini. Maka, terciptanya generasi yang sehat, cerdas, mandiri dapat diwujudkan di Papua tercinta. (\*)





## Rapat Koordinasi TPPS dan Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja & Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023

**Jayapura** - Salah satu permasalahan yang juga terjadi hingga saat ini di Papua adalah Stunting atau yang sering disebut kerdil. Ini menggambarkan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat gangguan atau terhambatnya penyerapan gizi menahun. Permasalahan Stunting di Provinsi Papua menjadi salah satu fokus program bidang kesehatan, guna mengantisipasi kondisi gizi kronis yang mengakibatkan anak tumbuh dengan kondisi yang tidak maksimal. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah provinsi Papua sekaligus menjadi fokus untuk menyusun program dan kegiatan yang bertujuan menangani dan mencegah stunting terjadi pada anak-anak. Papua harus terbebas dari stunting guna menciptakan anak-anak Papua yang cerdas, sehat dan berkembang.

Oleh sebab itu, untuk mengatasi dan menangani Stunting, Pemerintah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Bimbingan Teknis kepada Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan Stunting yang berlangsung selama 3 hari (20-22/7/2023). Kegiatan ini dibuka oleh Plh. Sekda Papua. Beliau menyampaikan apresiasi dan berterima kasih atas pelaksanaan agenda penting dan strategis, sebagai forum untuk

mewujudkan kepedulian dan komitmen pemerintah daerah dalam rangka penanganan dan pencegahan Stunting tahun 2023 di provinsi Papua. Prevalensi Stunting Provinsi Papua dari hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan angka 34,6 (masih 29 kabupaten/kota).

Tujuan utama dilaksanakannya rapat koordinasi TPPS dan bimbingan teknis tim penilaian adalah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan program percepatan penurunan Stunting yang menjadi urusan masing-masing OPD seperti yang tertuang dalam Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting serta memperkuat peran fungsi bimbingan dan pengawasan program kegiatan dimana TPPS lebih memahami tugas dan fungsinya, memiliki komitmen, membantu memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, memberikan rekomendasi dan penghargaan kepada kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi.

Diharapkan dari terselenggaranya kegiatan ini menghasilkan rencana, program, kegiatan yang tepat dan dapat diaplikasikan dengan baik sehingga Stunting ini dapat ditangani dan dicegah agar anak-anak dapat bertumbuh dengan sehat dan menjadi penerus untuk memajukan Papua dimasa depan. (\*)

## Kegiatan Monitoring Meja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023

**Jayapura** - Kegiatan monitoring meja dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023 di Hotel Azana - Jayapura. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sasaran dan kinerja tercapai, dan sumber daya digunakan dengan efisien, serta mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya.

Sebagai informasi daya serap anggaran masih dinawah 30 persen, dengan kategori masih sangat rendah, ini harus menjadi perhatian Bersama mengingat waktu pelaksanaan anggaran secara efektif 5 (lima) bulan lagi, dan mendapatkan dana perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

SKPD sampai saat ini belum melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan khususnya laporan capaian target keluaran atau realisasi fisik. aplikasi terkait monitoring dan evaluasi adalah aplikasi TP2K agar digunakan dan

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Aplikasi ini mempermudah setiap SKPD, khususnya dalam melakukan proses E-monitoring dan evaluasi, untuk mengetahui proses dan capaian akhir dari kegiatan atau program

Hal ini bertujuan untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan setiap SKPD dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Setelah dilaksanakan kegiatan monitoring meja ini akan dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengendali Program dan Kegiatan (Rakor TP2K) yang diikuti oleh seluruh kepala SKPD yang bertujuan mendapat laporan perkembangan realiasi penyerapan dana dan realiasi pencapaian target keluaran atau realisasi fisik program dan kegiatan setiap SKPD terkhusus lagi program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otsus serta progress rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan, Pengendalian Inflasi, Penanganan Stunting dan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Hasil dari Rakor TP2K ini menjadi salah satu penilaian kinerja setiap SKPD. (\*)







## Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan SKP dan Sosialisasi Simpeg

**Jayapura** - Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dibutuhkan kemampuan dalam menyelesaikannya. meningkatkan kemampuan sangat diperlukan oleh siapapun. Begitu juga dalam ruang lingkup pemerintahan perlu juga ASN (Aparatur Sipil Negara) dibekali dengan berbagai pelatihan guna mengembangkan kapasitas, profesional, kompeten dan kompetitif. Hal ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk memperjelas peran, hasil dan tanggungjawab Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah. Bappeda Provinsi Papua menyelenggarakan Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan SKP dan Sosialisasi Simpeg pada tanggal 12 - 16 Juni 2023 di Ruang Rapat Lantai I Bappeda

Provinsi Papua. kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Bappeda provinsi Papua. dihadiri oleh seluruh ASN di Bappeda Provinsi Papua.

Tujuan kegiatan ini yakni terlaksananya sosialisasi kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara dan memberikan pemahaman terkait pengelolaan kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara) kepada pegawai. dalam kegiatan ini dihadiri oleh Seluruh pegawai Bappeda Provinsi. kemudian dalam sosialisasi ini didampingi oleh Narasumber dari BKN Pusat. tidak hanya itu dihadiri juga oleh KANREG IX BKN dan BKD Provinsi Papua yang turut mendukung kegiatan ini.

Kegiatan sosialisasi ini berlangsung lancar dan peserta mengikuti kegiatan dengan serius dan antusias hingga selesai. pada hari terakhir sosialisasi tersebut, Kegiatan resmi ditutup oleh Kepala Bappeda Provinsi Papua yang diwakili oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Papua. Harapan Besar setelah terselenggaranya kegiatan ini adalah Seluruh ASN Bappeda Provinsi Papua dapat mandiri dan bertanggung jawab dalam membuat SKP dan tertib serta disiplin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai perjanjian kerja.(\*)

## Pendampingan Penyusunan Proposal Satuan Inovasi dan Penginputan Indikator Indeks Inovasi Daerah di Lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2023

**Jayapura** - Perencanaan, penyelenggaraan akan suatu kegiatan atau aktivitas apapun dalam segala aspek sangat diperlukan inovasi. Dengan adanya inovasi maka akan tercipta hal-hal yang baru atau dapat dikatakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Inovasi sendiri memiliki makna yakni perubahan cara berpikir yang mengandung lompatan-lompatan makna, temuan-temuan yang sifatnya baru, ide dan gagasan-gagasan baru.

Dalam mewujudkan Papua Bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan serta 5 (lima) misi pembangunan Papua, maka stakeholders fokus terhadap percepatan pembangunan di daerah yang mengedepankan inovasi dan mendayagunakan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin). Berinovasi juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dalam pasal 386 berbunyi bahwa Kepala Daerah dapat melakukan Inovasi yaitu dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini menyatakan bahwa pemerintah daerah

diberikan kewenangan yang luas untuk membangun dan mengembangkan daerahnya untuk menjadi kreatif dan inovatif.

Melalui Bappeda Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua telah melaksanakan Fasilitas Inovasi Daerah kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua pada Tahun 2021 dan 2022. Semua membuahkan hasil, Papua berada di urutan 17 (tujuh belas) kategori inovatif pada tahun 2021, namun di tahun 2022 Papua mengalami penurunan peringkat ke peringkat 31 (tiga puluh satu).

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan ASN yang mengikuti kegiatan pendampingan ini dapat menjadi pamong inovasi yang menjadi barometer di unit kerjanya agar lebih maju dan inovatif tentunya. Maka dari itu, berinovasi harus menjadi budaya yang melekat dan merubah mindset di dunia pemerintahan, agar tidak berhenti dititik yang sama melainkan terus semangat berkinerja dengan kreatif, lebih maju dan penuh dengan gagasan gagasan spektakuler demi Papua yang lebih Maju.(\*)







# Simtaru Provinsi Papua Tahun 2023

## Kebijakan Satu Peta

Kebijakan perencanaan daerah dengan menggunakan satu peta yang sama.

[Lihat Data](#)



**Jayapura** - Simtaru adalah sistem tata ruang sebagai alat control dan monitoring implementasi RTRW untuk menampung informasi dan aspirasi stakeholder terhadap implementasi RTRW. Tujuan dibentuknya simtaru adalah untuk menerapkan standar baku dalam melakukan kegiatan pengelolaan data dan informasi, baik spasial maupun non spasial terutama dalam hal jenis data yang dikumpulkan berikut tatarannya, meningkatkan kualitas hasil pengelolaan data berbasis spasial yang dihasilkan oleh simtaru, menghindari keragaman jenis data sebagai bahan kebijakan, meningkatkan kualitas output dari pengelolaan data dan informasi di provinsi Papua, memudahkan pelaksanaan keberlanjutan dan konsistensi proses pengelolaan data apabila terjadi pergantian personil, mengurangi peluang terjadinya perbedaan jenis pelaporan dan kesalahan persepsi antar pengelola data, merekonstruksi proses pengelolaan data yang

telah berjalan pada saat tidak ada referensi lain yang tersedia dan memberikan acuan dan tatacara dalam pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan data dan informasi.

Simtaru memiliki beberapa manfaat, antara lain standarisasi data dan informasi tata ruang untuk memudahkan dalam penyelarasan dengan data lain yang terkait dengan data spasial RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota, standarisasi pedoman baku agar pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan data dapat berjalan secara efektif dan efisien, standarisasi penggunaan dan distribusi formulir, blanko, dan dokumen dalam prosedur operasional standar pada setiap kegiatan tata kelola data agar memudahkan dalam monitoring dan pelaporan, standarisasi sistem administrasi (termasuk kegiatan penyimpanan data dan sistem dokumentasi) dari kegiatan tata kelola data sebagai acuan, standarisasi untuk kegiatan validasi data

agar diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai simpul jaringan informasi geospasial daerah.

Pembaharuan simtaru terus menerus dilakukan sehingga telah menjadi geoportal daerah yang sudah terintegrasi dengan ina-geoportal dan telah memiliki platform lapor tarung (indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang) serta memiliki server mandiri (dikelola oleh pemda Papua) data simtaru akan dilakukan update terhadap data-data informasi geospasial dasar (igd) dan informasi geospasial tematik (igt). pengembangan yang lebih inovatif (penambahan fitur-fitur) juga akan dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan informasi geospasial daerah dan nasional.

Dalam masa penetapan 3 provinsi dob (daerah otonomi baru) sangat berdampak pada tata ruang. Penetapan peraturan daerah provinsi papua tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Papua tahun 2022-2041 yang ditargetkan pada bulan

Oktober tahun 2022 tidak bisa terlaksana. penyebab hal ini terjadi dikarenakan adanya pembentukan daerah otonomi baru (DOB) yaitu pembentukan Provinsi Papua Selatan, pembentukan Provinsi Papua Tengah dan pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana telah diatur dalam UU 26 tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa kewenangan pemerintah provinsi hanya menyusun dan menetapkan RTRW provinsi. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan wilayah perencanaan yang semula 29 Kabupaten/ Kota menjadi 9 Kabupaten/Kota yang mana akan mempengaruhi penyesuaian semua rencana yang ada dalam materi/dokumen RTRWP Papua yang telah disusun. ini juga yang membuat keterlambatan dalam penetapan perda RTRW Provinsi Papua. sehingga target penetapan rtrw provinsi Papua akan dilakukan pada tahun 2023. simtaru dapat diakses melalui website <https://simtaru.papua.go.id/>.(\*)



## Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Melalui Sistem TP2K (Tim Pengendalian Program dan Kegiatan)

**Jayapura** - Pelaksanaan program dan kegiatan didalam APBD harus dipantau melalui monitoring dan evaluasi. tentunya, dengan cara yang dapat mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut. Maka dari itu, terbentuklah aplikasi TP2K atau dengan kepanjangan tim pengendalian program dan kegiatan TP2K juga menjadi solusi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Gubernur Papua dalam memantau, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan dalam APBD.

Setiap SKPD dapat melaporkan program realisasi fisik dan anggaran program dan kegiatan. Aplikasi TP2K ini terus melakukan pengembangan atau upgrade yakni menambah fitur-fitur yang sangat membantu pelaksanaan

monitoring dan evaluasi. apabila ada kendala pengoperasian sistem TP2K, maka tim dapat meminta realisasi anggaran dari masing-masing skpd pada bagian keuangan yang dapat dilihat pada aplikasi simda ataupun sistem fmis.

Melalui hasil monitoring meja dapat ditemukan kendala-kendala yang ditemukan oleh SKPD sebagai berikut pertama belum memahami dengan baik pengoperasian sistem aplikasi TP2K versi terbaru dengan baik, kedua untuk kegiatan SKPD yang menggunakan dana otsus banyak kegiatan belum berjalan karena menunggu pencairan dana otsus, ketiga untuk SKPD yang melakukan kegiatan lelang umum, banyak yang belum berjalan sesuai jadwal dikarenakan proses penyiapan dokumen-dokumen kegiatan yang sering terlambat dan juga proses perencanaan, pengawasan berjalan di tahun anggaran yang sama dengan proses pelaksanaan sehingga mengakibatkan kegiatan tender/ lelang banyak mengalami keterlambatan dalam melaksanakan kegiatan.(\*)

**Simon Petrus, SE., MM**  
Kasub Bid Monitoring & Evaluasi



## Pembangunan Ekonomi Inklusif: Upaya Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan

**Jayapura** - Pembangunan ekonomi inklusif menurut Bappenas adalah pembangunan ekonomi yang menciptakan atau memberikan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Dibutuhkan komitmen dalam upaya pelaksanaan pembangunan ekonomi inklusif, yang dapat dicapai dengan cara melaksanakan tiga pilar utama, yaitu mengoptimalkan kesempatan ekonomi, tersedianya jaminan sosial, serta ketersediaan akses yang sama bagi kesempatan ekonomi. Selain itu, dibutuhkan pula kebijakan afirmatif dalam masing-masing kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi inklusif.

Pertumbuhan dalam konsep pembangunan ekonomi inklusif dapat menciptakan kesem-

patan ekonomi bagi penduduk miskin serta memastikan bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan melibatkan semua golongan masyarakat yang terpinggirkan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi inklusif harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan tersebut. Diharapkan pembangunan ekonomi inklusif tersebut akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan, memperkecil ketimpangan pembangunan antar wilayah, menurunkan kemiskinan, serta dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan berfokus pada perluasan skala ekonomi, perluasan akses terhadap aset perekonomian, dan perluasan pasar serta menciptakan pemerataan peluang dalam upaya memperluas kemakmuran ekonomi.



Untuk Provinsi Papua, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain terkait pengentasan kemiskinan, tingkat pengangguran yang masih tinggi, serta belum optimalnya pendayagunaan komoditas unggulan berbasis potensi lokal dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dengan demikian, dibutuhkan perhatian serius dalam mengatasi masalah kemiskinan serta perbedaan kondisi kemiskinan antar wilayah/daerah di Provinsi Papua sehingga jumlah pendapatan penduduk di daerah-daerah dengan angka kemiskinan tinggi ini dapat meningkat dan pada akhirnya dapat mengurangi jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori dibawah garis kemiskinan. Sementara itu, guna penguatan dan percepatan perekonomian Provinsi Papua maka perlu dilakukan penguatan ekonomi daerah berbasis karakteristik dan potensi setiap wilayah dengan menitikberatkan pada hubungan antar wilayah/kampung yang didorong keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah/daerah yang kokoh dan berkesinambungan. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas sumber daya ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan mutu produk dan menciptakan nilai tambah.

Dalam rangka penguatan dan percepatan pembangunan ekonomi inklusif, maka perlu diberikan akses seluas-luasnya bagi Orang Asli Papua (OAP) dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat. Pemberdayaan Orang Asli Papua diprioritaskan untuk menjamin akses bagi masyarakat memperoleh sumber daya ekonomi; memperkuat

kemampuan dan kelembagaan masyarakat kampung untuk mengelola sistem produksi, konsumsi dan infrastruktur secara mandiri; dan pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan. Sementara itu, guna mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih mampu mendorong percepatan kemandirian masyarakat asli Papua maka dilakukan pengembangan wilayah berbasis kultural (wilayah adat Saereri dan Mamta) dengan berfokus pada pembangunan berbasis kampung serta dengan prinsip kesetaraan pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian kualitas hidup di seluruh wilayah Provinsi Papua. Kemudian, peningkatan dan percepatan konektivitas antar wilayah serta pemenuhan sarana dan prasarana dasar di wilayah distrik dan kampung, pengembangan tenaga listrik terbarukan serta pengembangan jaringan telekomu-

nikasi dan informasi bagi masyarakat asli Papua perlu dilakukan guna mendukung perekonomian dan pengembangan wilayah secara merata.

Dalam rangka mewujudkan Papua Produktif, maka salah satu strateginya adalah mewujudkan kampung mandiri guna menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan di sektor pertanian secara luas serta sektor ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan; pendayagunaan potensi sumberdaya alam secara optimal, efisien, dan dengan memperhatikan hak Masyarakat adat serta berdasarkan prinsip ekofisiensi; menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah serta peningkatan koperasi dalam rangka menumbuhkan

perekonomian daerah.

Pembangunan kampung mandiri ekonomi menjadi salah satu solusi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam menjawab permasalahan yang dihadapi selama ini. Diharapkan dengan adanya pembangunan kampung mandiri ekonomi akan mampu menciptakan atau memberikan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah yang pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pengembangan potensi ekonomi yang dimulai dari kampung akan mampu memberdayakan masyarakat menuju kesejahteraan ekonomi dengan melakukan penguatan dan pengembangan potensi lokal yang pada akhirnya dapat pula meningkatkan kreatifitas dan nilai ekonomi produk masyarakat.

Guna tercapainya keberhasilan pembangunan kampung mandiri ekonomi, maka perlu dilakukan beberapa hal, antara lain: perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi objektif yang sesuai dengan sosial wilayah; keseriusan dan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat untuk melaksanakan program tersebut sesuai dengan perencanaannya; kerjasama dan kolaborasi dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat dalam pengelolaan program; serta adanya kontrol yang baik dari semua pihak yang terlibat.

Akhirnya, diharapkan pembangunan ekonomi inklusif dapat menjadi solusi dalam mencapai kesejahteraan ekonomi di Provinsi Papua. (\*)





# Kunjungan Penjabat Gubernur Papua di Kabupaten Supiori Dalam Rangka Peninjauan Program Penurunan Stunting

**Jayapura** - Penjabat Gubernur Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE, MM melakukan peninjauan program penurunan stunting Kabupaten Supiori pada hari Rabu 4/10/2023. Kabupaten Supiori merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Namun ironis, Masyarakat Kabupaten Supiori masuk dalam kategori mengalami stunting yang cukup serius. Berdasarkan data menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten ini sebesar 40,2%. Maka dari itu data ini menjelaskan bahwa angka tersebut menjadikan Kabupaten Supiori mengalami stunting tertinggi di Provinsi Papua. Tercatat distrik Supiori Utara mengalami stunting presentase tertinggi sebesar 37,4%, sedangkan distrik Supiori Barat adalah distrik yang memiliki angka stunting terendah sebesar 11%. Kampung yang mengalami stunting tertinggi yakni kampung Aruri sedangkan angka terendah sebesar 53,57% di kampung Masyai. Anak stunting tertinggi terdapat di kampung Wongkei sebesar 30% dan terendah di kampung Insumberi sebesar 7%. Data dan informasi tersebut menjadi tolak ukur upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Supiori selama ini. Perlu kita ketahui bahwa masalah stunting bukan hanya masalah kesehatan, ketidakmaksimalan dalam mengupayakan penurunan stunting dapat berakibat fatal juga

pada pembangunan Papua, generasi muda Papua akan mengalami krisis kemampuan dan perkembangan.

Pemerintah Kabupaten Supiori dan semua pihak yang terlibat telah mengupayakan mengatasi stunting dengan melakukan program-program pemberian gizi, penyuluhan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat. Dalam kunjungan Penjabat Gubernur Papua ini juga menerangkan berbagai

macam bantuan dari SKPD terkait antara lain Bappeda Provinsi Papua memberikan bantuan bahan makanan bergizi berupa telur, kacang hijau dan susu. Dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua memberikan bantuan berupa Bantuan kelambu sebanyak 7.300 Pcs, Obat cacing albendazole sebanyak 128.000 tablet dan pirantel pamoat 4000 tablet, obat tambah darah 88.000 tablet,

Vitamin A sebanyak 3.350 tablet, Obat Malaria DHP sebanyak 5.66 buah untuk penanganan stunting. Dari dinas pertanian Provinsi Papua juga memberikan bantuan berupa bantuan beras sebanyak 2.650 kg, 1 unit pekerjaan bangunan pengolahan sagu. Dinas Kehutanan dan lingkungan hidup Provinsi Papua memberikan bantuan berupa bantuan bibit tanaman produktif di kampung Yendoker, 1 unit speedboat untuk perlindungan hutan mangrove di kampung Soweke. Dinas pendidikan Provinsi Papua memberikan bantuan berupa bantuan 200 judul buku sebanyak 274 eksemplar. Pemberian bantuan dari bulog sebanyak 10 kg dengan target 2.704 KPM dan bantuan paket pangan dengan target 100 orang. Selanjutnya, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua dan OAP memberikan bantuan berupa perahu fiber, mesin tempel Yamaha dan coolbox 1 paket.

Dalam kunjungan ini, dilaksanakan kegiatan penanaman bibit di halaman Kantor Bupati yang diikuti oleh Penjabat Gubernur Papua, Plh Sekda Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati, Sekda Kabupaten Supiori serta tak lupa para kepala SKPD Provinsi Papua dan didukung oleh Mitra Pembangunan Papua dan Provinsi Papua Barat. Peninjauan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung fakta yang ada di lapangan sehingga informasi yang didapat menjadi acuan pengambilan kebijakan guna mengatasi persoalan yang pelik ini secara tepat dan benar. Harapan besar setelah ada peninjauan penurunan stunting dan juga upaya yang dilakukan segera membawa hasil yang baik. Menjadikan anak-anak Papua sehat, mandiri serta dapat melanjutkan tongkat estafet. (\*)





# Rapat Koordinasi Papua Integrasi Satu Data Provinsi Papua Tahun 2023

**Papua** Integrasi Satu Data Provinsi Papua Tahun 2023 terselenggara dengan sukses melalui Pusat Data dan Analisa Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Papua pada Kamis 30 November 2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dihadiri oleh para narasumber dari Bappenas RI dan Kementerian Dalam Negeri, beberapa SKPD seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung, Bappeda dan Badan Pusat Statistik se Kab/Kota, SKPD Provinsi Papua, wali data pendukung dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Mitra Pembangunan yang ada di Provinsi Papua. Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua Bapak Yohanes Walilo, S.Sos.,M.Si. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik berbasis data atau bukti dan penguatan pengendalian pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian daerah. Faktor utama dalam mendorong dan mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah ketersediaan

data dan informasi karena dengan adanya data/informasi yang berkualitas akan menjamin perencanaan dan pembangunan yang berkualitas bagi kesejahteraan masyarakat. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan peraturan Presiden Republik Indonesia no. 39 tahun 2029 tentang Satu Data Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua merespon kebijakan Satu Data Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Gubernur No. 50 tahun 2021 tentang Papua Integrasi Satu Data dengan maksud mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, akuntabel dan terintegrasi dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah berbasis data dan elektronik".ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua pada bulan Januari tahun 2023 lalu, telah melaksanakan Workshop Penguatan Forum data bagi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Mamberamo Raya, yang diikuti kemudian dengan workshop penguatan forum data di wilayah adat saireri ini merupakan komitmen dan konsistensi dari pemerintah provinsi dalam mendukung ketersediaan data yang

menjadi elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan di Provinsi Papua. Perlu diketahui, bahwa ketersediaan data sektoral adalah agenda utama Pj. Gubernur Papua dengan mengunjungi BPS Papua guna melakukan koordinasi dan konsolidasi khususnya pada data sektoral yang diharapkan dapat membantu proses perencanaan yang lebih baik namun juga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Salah satu isu penting di Provinsi Papua adalah ketersediaan data orang asli papua (OAP) yang merupakan salah satu indikator perhitungan dan pengalokasian dana otonomi khusus di provinsi dan kab/kota. Data OAP menjadi salah satu contoh tantangan kita bersama dimana belum optimalnya keterpaduan data antar setiap level pemerintahan dan instansi vertikal. Tantangan ini dapat kita hadapi dengan menciptakan koordinasi, komunikasi dan konsolidasi terkait satu data di papua melalui forum data di tingkat provinsi dan kab/kota yang melibatkan seluruh instansi terkait. Dengan data yang akurat, terkini dan valid berbasis elektronik yang terintegrasi pada satu portal dapat dipastikan bahwa hasil pembangunan dapat menjawab tantangan dan permasalahan masyarakat serta mampu meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, persaingan dan kerjasama daerah.

Rapat koordinasi papua integrasi satu data Provinsi Papua tahun 2023 ini berlangsung selama 2 hari hingga hari Jumat (1/12/2023). Hari kedua lebih fokus presentasi mengenai bagaimana data orang asli papua dihadirkan melalui system orang asli papua atau yang disingkat SIO PAPUA. dibantu oleh SKALA, mitra kerja Bappeda Provinsi Papua dimana menjelaskan seluruh Bisnis Proses dalam menghadirkan data dan pembangunan system SIO PAPUA. sistem ini juga sangatlah penting karena tersedia data berbasis kampung. Pemerintah Provinsi Papua dapat mengambil kebijakan yang tepat dengan mengarah pada Sistem Papua Integrasi Satu Data atau PAITUA yang terintegrasi dengan SIO PAPUA, masyarakat dapat secara langsung merasakan pelayanan pemerintah dengan membantu mengurangi masalah mereka terlebih pada masalah Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan.

Harapan besar dengan terselenggaranya kegiatan ini, dapat semakin memperkuat komunikasi, koordinasi dan konsolidasi yang positif, para peserta rakor dapat menyampaikan pertanyaan, saran, masukan dan sharing pengalaman dalam mewujudkan satu data. Maka dari itu, perlu dukungan terus menerus dari Kab/Kota dan Provinsi untuk mewujudkan Satu Data Indonesia di Provinsi Papua yang berkualitas. (\*)





# Pembangunan Di Masa Kepimpinan Bapak Lukas Enembe di 5 (Lima) Tahun Terakhir

**Pasangan** terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2018 -2023, Lukas Enembe, S.IP., MH – Klemen Tinal, SE., MM sebagai incumbent di periode 2013-2018 sebelumnya, sehingga akan lebih muda untuk melanjutkan apa yang menjadi visi, misi dan kebijakan selanjutnya.

Kalau kita melihat capaian dan prestasi pembangunan dimasa kepemimpinan Lukmen 5 tahun terakhir adalah lebih pada memantapkan kebangkitan Provinsi Papua di segala bidang, memantapkan kemandirian diseluruh dimensi pembangunan yang mencakup bidang ekonomi, sosial dan politik serta dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dalam pemenuhan dan kecukupan kebutuhan dasar.

Apa yang tertuang dalam misi sebagai pelaksanaan dari visi dengan harapan dapat dicapai dimasa kepemimpinannya. Ini menjadi tugas semua pimpinan SKPD untuk mewujudkan cita-cita yang mulia yaitu pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di kampung-kampung.

Pembangunan di Papua menjadi tantangan yang kompleks, karena provinsi ini memiliki beragam kelompok etnis, geografis yang

sulit, serta tantangan sosial dan ekonomi yang unik. Namun dengan kepemimpinan Lukas Enembe bersama pemerintah pusat dan semua komponen yang berkepentingan serta masyarakat setempat, pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dapat dicapai.

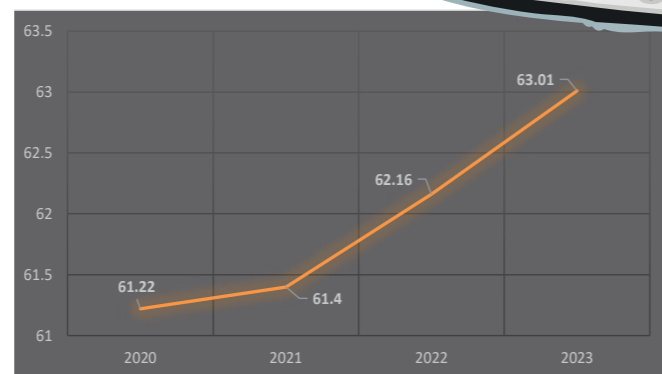


- **Laju Pertumbuhan Ekonomi & PDRB Perkapita**  
Pertumbuhan Ekonomi Papua tanpa pertambahan di Provinsi Papua mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan tahun 2021, pada tahun 2022 ekonomi Tanpa Pertambahan sebesar, dan 1,58, dan Nilai PDRB Perkapita pada Tahun 2022 sebesar 59,41 Juta Rupiah, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 54,07 Juta Rupiah meningkat sebesar 9,89 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya semua sektor.

Berbagai ragam pencapaian pembangunan periode 2018-2023 dimasa kepemimpinan Lukas Enembe antara seperti:

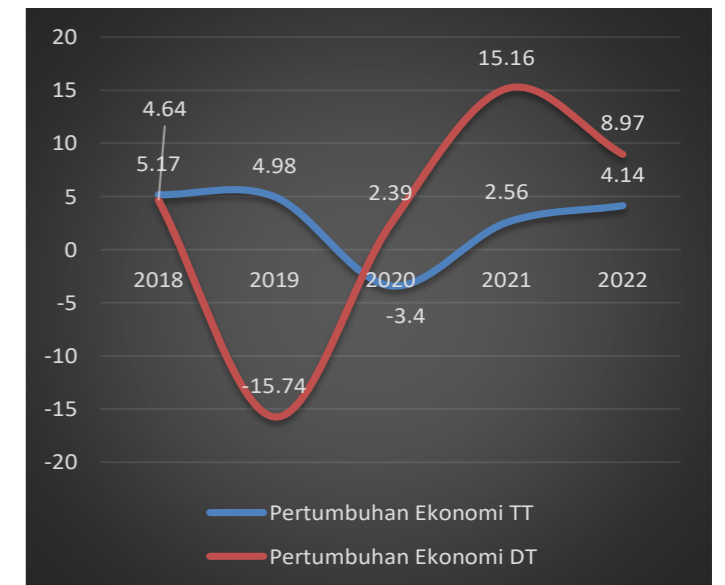
**01 Indikator Makro;** Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial,

- Kualitas hidup pembangunan manusia, **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

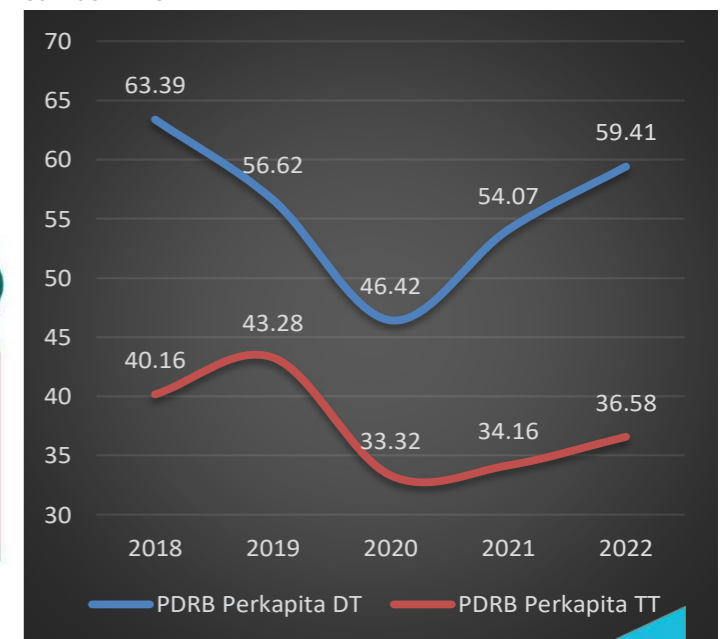


Sumber: BPS

Sebagai ukuran kualitas hidup, di tahun 2020 IPM Provinsi Papua 61,22 poin meningkat menjadi 63,01 poin, peningkatan ini terjadi pada semua dimensi dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.



Sumber: BPS

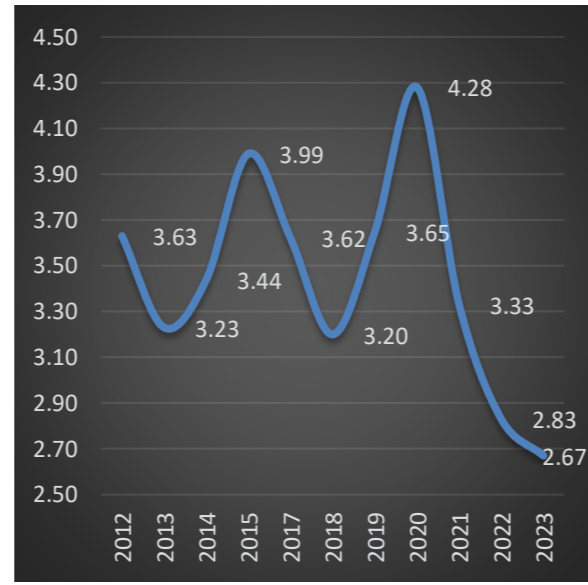


Sumber: BPS



Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2021	Agustus 2022	Februari 2023
Penduduk Usia Kerja	2,449,28	3.221,86	3.267,05
Angkatan Kerja	1,837,28	2.584,86	2.508,64
Bekerja	1,763,18	2.491,80	2.421,12
Penganggur	69,10	93,06	87,51
Bukan Angkatan Kerja	662,00	637,00	758,41
TPAK	73,47	80,23	76,79
Laki-laki	83,58	87,48	85,86
Perempuan	62,06	71,81	66,26

Sumber: BPS

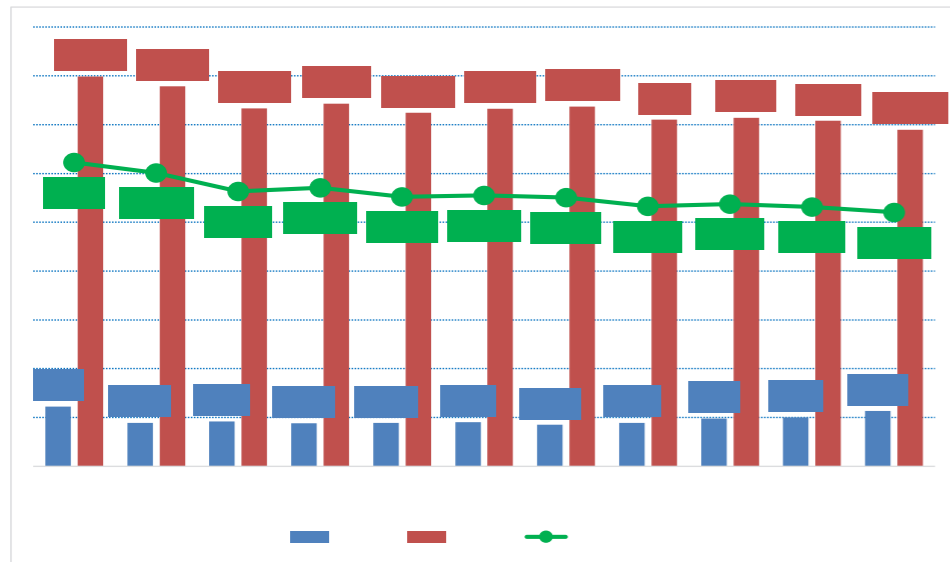


Sumber: BPS

**Tingkat Pengangguran Terbuka**

Penduduk usia kerja di Provinsi Papua berjumlah 3.267,05 ribu orang pada Februari 2023, naik hampir 45,19 ribu orang dibandingkan Februari 2022. Pada Februari 2021, dari total penduduk usia kerja yang ada di Papua, 73,47 persen merupakan

Angkatan Kerja. Angka tersebut dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Meskipun angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya (Februari 2020), TPAK Provinsi Papua menunjukkan peningkatan sebesar 1,31 persen dibandingkan kondisi Agustus 2020.



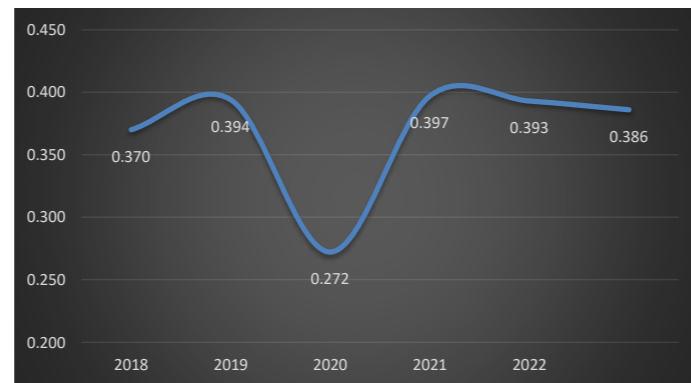
Sumber: BPS

**Kemiskinan**

Secara umum, pada periode Maret 2013 - Maret 2023 tingkat kemiskinan mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Tercatat persentase penduduk miskin pada periode tersebut turun sebesar 5,43 persen

**Gini Ratio**

Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Papua yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,386. Angka ini mengalami penurunan 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,393 dan mengalami penurunan 0,020 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,406.



Sumber: BPS

**Kemantapan Jalan Provinsi**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan Provinsi	km	2,361.76	2,361.76	2,361.76	2,361.76	2,361.76
2	Panjang Jalan Provinsi Kondisi Mantap	km	1,170.87	1,256.18	1,267.98	1,370.72	1,035.01
3	Panjang Jalan Provinsi Kondisi Tidak Mantap	km	1,190.89	1,105.58	1,093.78	991.04	1,326.75

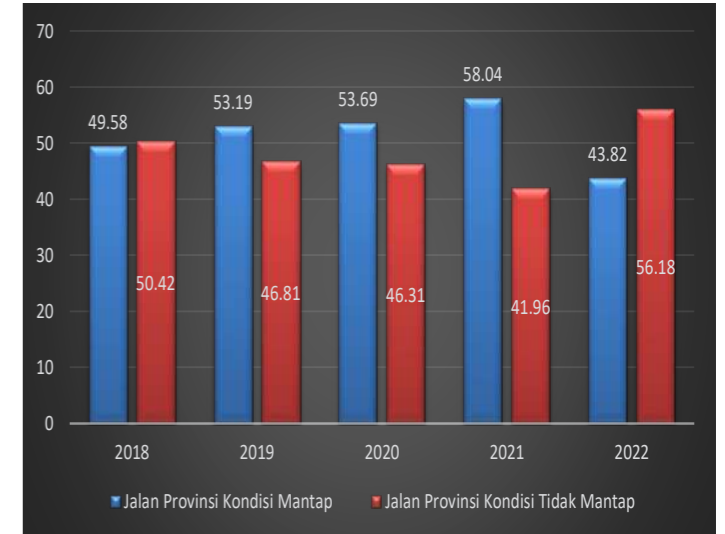
Sumber : Kementerian PUPR RI

**02 Sektor Infrastruktur,** pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan jembatan serta infrastruktur lainnya adalah sebagai bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Seperti infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah di Provinsi Papua sebelum DOB maupun setelah terbentuknya DOB. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan ini dimaksudkan guna membantu, memudahkan dan membuka akses baik perjalanan melalui udara, darat maupun laut dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya, akses dari satu distrik ke distrik lainnya dalam satu kabupaten maupun akses ke wilayah yang terpencil sekalipun, dengan tujuan guna mendukung pertumbuhan ekonomi OAP setempat

Jalan dalam kondisi mantap mengacu pada infrastruktur transportasi yang telah dirancang dan dibangun dengan standar tinggi untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan ketahanan jangka panjang. Jalan-jalan ini umumnya terdiri dari campuran aspal atau beton yang ditempatkan di atas dasar yang kokoh. Konstruksinya seringkali lebih tebal dan kuat, mampu menahan beban berat dan lalu lintas kendaraan yang intensif.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Papua telah bersama-sama melakukan Pembangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu konektivitas antar daerah di Papua yaitu sepanjang 2,36 ribu kilometer. Panjang

**Persentase Kemantapan Jalan Provinsi Papua**



Sumber : Kementerian PUPR RI

jalan Provinsi dalam kondisi mantap yang terpanjang adalah pada tahun 2021 sekitar 1,37 ribu kilometer dengan nilai persentase sebesar 58,04. Sedangkan pada tahun 2022, Panjang jalan dalam kondisi tidak mantap yang terpanjang adalah sebesar 1,33 ribu kilometer dengan nilai persentase sebesar 56,18. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya pemeliharaan rutin pada jalan ini untuk memastikan keberlanjutan kondisi mantapnya. Pemantauan terus-menerus dan perbaikan cepat biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa jalan tetap aman dan efisien, namun berada dalam kondisi tersebut juga diperlukan anggaran yang besar untuk dapat membangun infrastruktur jalan transportasi yang kokoh.

**03 Sektor Pendidikan,** pembangunan pendidikan di Tanah Papua memiliki makna yang sangat penting yaitu untuk mencerdaskan dan memajukan OAP. Pembangunan sektor pendidikan yang telah dilaksanakan

dikepimpinan Bapak Lukas Enembe, dapat disimak seperti :  
 a. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terutama anak-anak di daerah terpencil dan pedesaan, pada tahun 2022 Jumlah Sekolah Dasar 2.698, untuk SMP



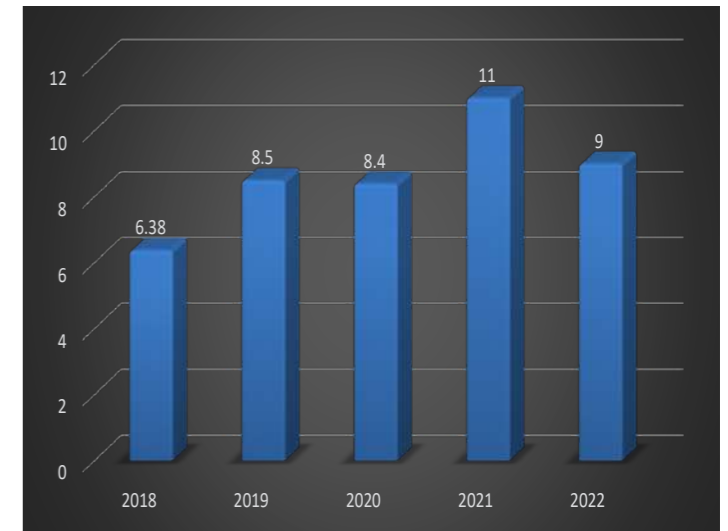
- 785 dan SMA/SMK 419 unit ini tersebar di 9 Kabupaten Kota di Provinsi Papua.
- b. Mengurangi ketidaksetaraan/kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok etnis, APM (Angka Partisipasi Murni) bertujuan mengukur cakupan jenjang Pendidikan tertentu bagi kelompok usia pada jenjang tersebut, di untuk APM Usia 7-12 Tahun ditahun 2022
  - c. Meningkatkan kualitas Pendidikan, seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum

- yang relevan dan penyediaan sumber daya yang memadai di sekolah;
- d. Memberikan fasilitas pendidikan yang memadai kepada sekolah-sekolah yang terpencil dan melalui pendidikan dapat mendorong perubahan sosial dan politik yang positif. Dengan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada generasi muda, Papua dapat mempersiapkan pemimpin masa depan yang akan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

**Angka Kematian Bayi (AKB)**

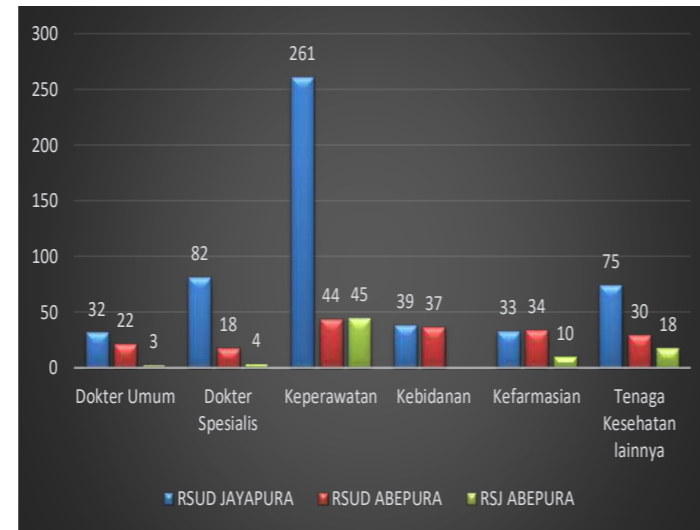
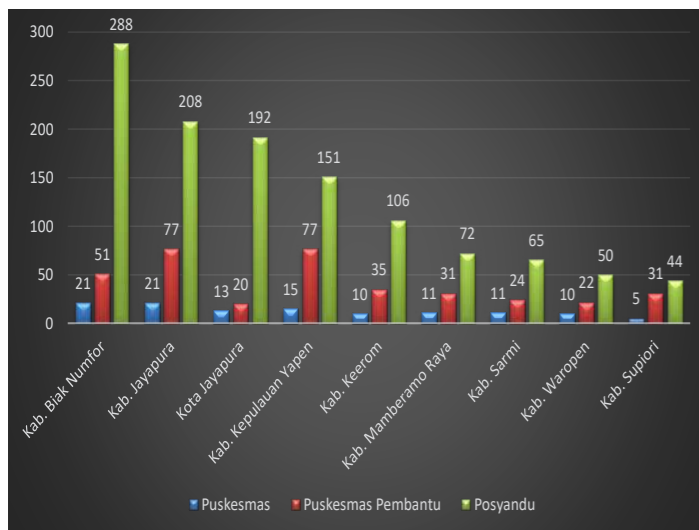
Angka kematian bayi, yang juga dikenal sebagai tingkat kematian bayi, adalah salah satu indikator kesehatan masyarakat yang penting. Tingkat kematian bayi mengukur jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun per seribu kelahiran hidup dalam suatu periode waktu tertentu.

Berdasarkan gambar grafik di samping menunjukkan adanya peningkatan angka kematian bayi pada tahun 2019 sebesar 2,1 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 8,5 per 1.000 kelahiran hidup jika dibandingkan tahun 2018 yang hanya sebesar 6,38 per 1.000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2021 adalah kasus angka kematian bayi paling tertinggi yaitu sebesar 11 per 1.000 kelahiran hidup, hal tersebut disebabkan oleh masa pandemi Covid-19. Meskipun ditahun 2022 menunjukkan penurunan hingga mencapai 9 per 1.000 kelahiran hidup, akan tetapi belum menunjukkan angka yang signifikan. Pengurangan tersebut juga tidak terlepas dari campur tangan pemerintah pusat dan daerah, namun masih



menjadi perhatian serius bagi Pemerintah pusat dan daerah agar dapat menuntaskan angka kematian bayi tersebut karena indikator tersebut masuk dalam penanganan angka stunting.

Hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat adalah perbaikan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan, Pendidikan Kesehatan Masyarakat bagi calon ibu yang belum memahami menjaga Kesehatan, dan perbaikan gizi serta akses terhadap makanan.



**04 Sektor Kesehatan,**

- pembangunan sistem kesehatan yang kuat dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan OAP seperti :
- Meningkatkan akses ke layanan kesehatan, yaitu pembangunan fasilitas kesehatan yang berkualitas terutama di daerah terpencil dan pedesaan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur kesehatan mencakup : rumah sakit, puskesmas, klinik dan pusat kesehatan lainnya serta penyediaan perawatan kesehatan yang berkualitas. Berikut jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Tipe, Puskesmas, Pustu, dan Posyandu menurut kabupaten kota di Provinsi Papua.
  - Peningkatan jumlah tenaga kesehatan,

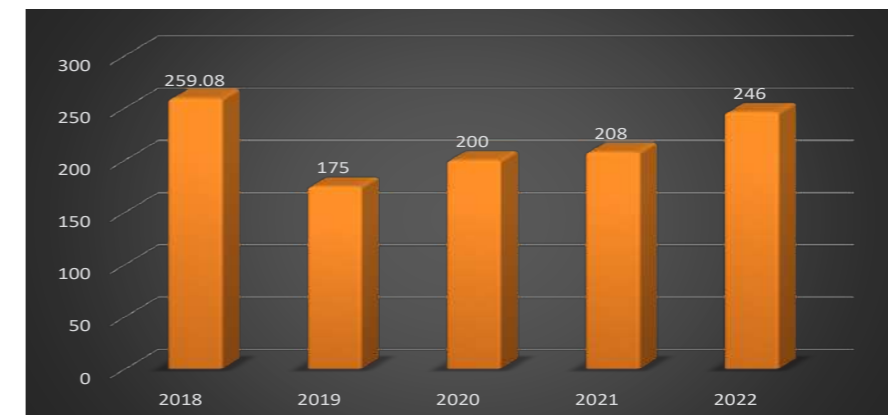
- merekrutmen tenaga kesehatan yang cukup, terutama dokter, perawat dan tenaga medis lainnya, yang harus didukung dengan peningkatan pelatihan tenaga kesehatan;
- Program imunisasi, untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan untuk meningkatkan cakupan imunisasi;
  - Penanggulangan penyakit menular seperti malaria, TB, dan HIV/AIDS serta pencegahan, pengobatan dan pendidikan masyarakat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah penyakit menular;
  - Kesehatan masyarakat dan pendidikan kesehatan, diberikan kepada lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang praktek-praktek sehat dan pentingnya kesehatan yang baik, seperti pencegahan terjadinya stunting.

**Angka Kematian Ibu (AKI)**

Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, atau yang dikenal sebagai tingkat kematian ibu, adalah ukuran penting untuk mengevaluasi kualitas perawatan kesehatan maternal dalam suatu populasi. Tingkat kematian ibu mencerminkan risiko yang dihadapi perempuan selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan.

Pada grafik diatas menunjukkan angka kematian ibu paling tertinggi di tahun 2018 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan angka 259,08 per

100.000 kelahiran hidup. Sedangkan tahun 2019 angka kematian ibu menurun hingga 175 per 100.000 kelahiran hidup, namun pada tahun 2020 hingga 2022 kembali meningkat hingga mencapai 246 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu yang tinggi menunjukkan adanya tantangan serius dalam perawatan kesehatan maternal. Faktor-faktor seperti kehamilan yang tidak terawasi dengan baik, komplikasi selama persalinan, dan akses terbatas terhadap perawatan kesehatan berkualitas dapat berkontribusi pada peningkatan angka kematian ibu.





## 05 Pelestarian Lingkungan, Papua

memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk hutan hujan tropis yang penting bagi lingkungan global. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan pelestarian lingkungan sangat penting. Upaya pelestarian hutan dan upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah bagian integral dari pembangunan di Papua yang telah dilakukan dimasa kepemimpinan Bapak Lukas Enembe.

### - Kawasan Hutan

Berdasarkan laporan BPS Indonesia memiliki Tutupan Hutan seluas 101,22 juta hektar (ha) tahun 2021, tutupan hutan paling besar di Indonesia berada di Pulau Papua yakni sebesar 32,88 juta hektar (ha) dan angka tersebut mencapai 77,91 persen dari total luas daratan pulau Papua. Namun, luas hutan paling banyak berkurang juga yaitu salah satunya Papua dengan luas 610,40 ribu hektar (ha), hal tersebut dapat terjadi karena penebangan hutan yang terus-menerus dilakukan baik itu legal maupun ilegal.

Hutan Konservasi yang memiliki fungsi untuk menjaga keanekaragaman hayati dapat terlihat dari salah satu wilayah dengan luas hutan konservasi terbesar di Tanah Air yaitu Tanah Papua. Berdasarkan data 2019 yang diperbaharui per 2021 luasan hutan konservasinya mencapai 6,73 juta hektar (ha).

### - Hutan Mangrove

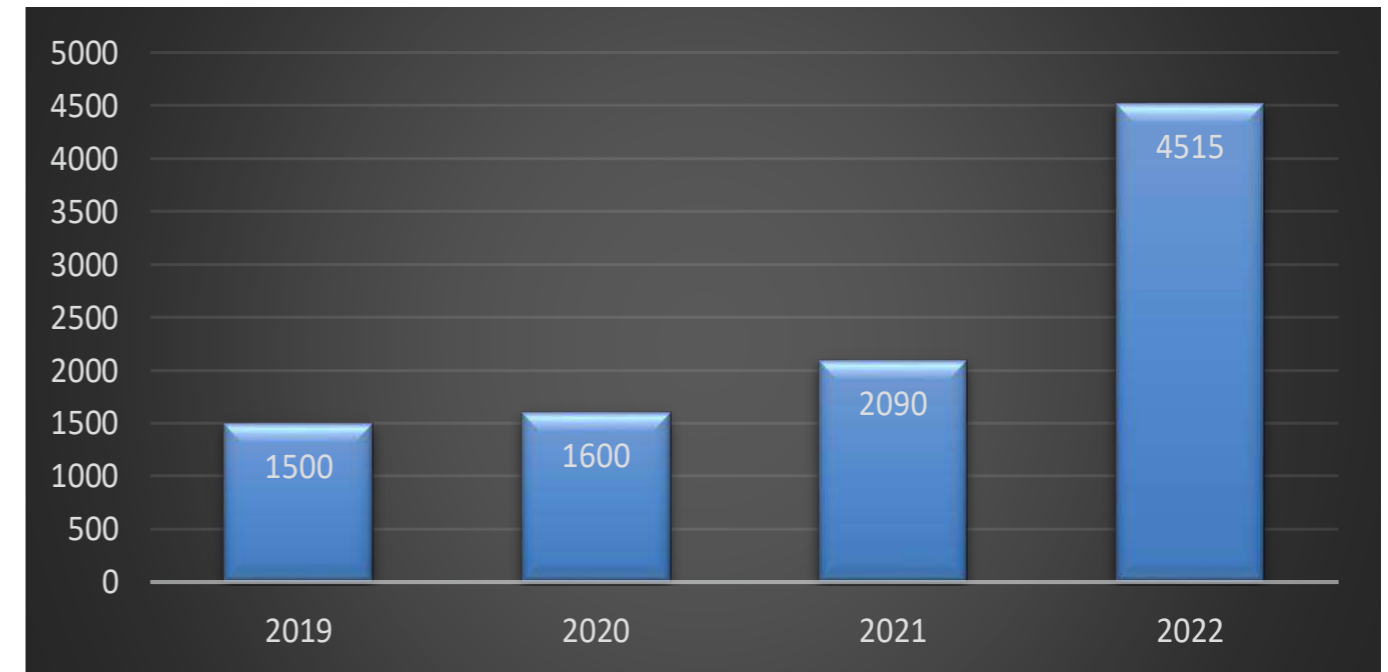
Berdasarkan data dari Peta Mangrove Nasional yang resmi dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 bahwa Indonesia memiliki luas mangrove seluas 3.364.076 hektare. Papua merupakan daerah dengan ekosistem mangrove terluas di Indonesia dengan luas 1,63 juta hektar (ha).

Keunggulan luas hutan, luas hutan mangrove dan kekayaan alam yang dimiliki Tanah Papua juga memberikan dampak bagi kesejahteraan orang asli Papua, hal tersebut dibuktikan dengan adanya otonomi khusus bagi Tanah Papua. Namun pelestarian lingkungan menjadi salah satu sektor yang harus menjadi perhatian bersama baik itu Pemerintah maupun Masyarakat. Langkah dan Kebijakan yang harus diimplementasikan yaitu Menerapkan praktik kehutanan berkelanjutan yang memperhatikan keberlanjutan ekologi, sosial, dan ekonomi, mendorong pembentukan koperasi dan inisiatif masyarakat lokal untuk pelestarian lingkungan hidup, Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik illegal logging dan perburuan liar, mendorong pengembangan ekowisata yang berkelanjutan sebagai cara untuk memberikan nilai ekonomi kepada masyarakat lokal tanpa merusak lingkungan, dan mendukung pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif untuk melindungi ekosistem dan spesies yang kritis.

di Tanah Papua, salah satunya program Pemberdayaan Masyarakat melalui Orientasi Pertumbuhan dan Potensi Unggulan di Industri dan UKM.

Pada tahun 2019 jumlah UMKM yang Berkembang hanya mencapai 1,500 unit, namun seiring berjalannya waktu Jumlah UMKM yang Berkembangpun mulai meningkat di tahun 2020 sebesar 100 unit menjadi 1,600 unit dan menjadi 2,090 unit tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 meningkat sangat signifikan yaitu sebesar 2,425 unit. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari campur tangan pemerintah daerah, dengan melakukan pengembangan usaha mikro kecil

Jumlah UMKM Yang Berkembang



dan menengah melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal, pameran UMKM berbasis kearifan lokal.

Pemerintah Daerah memerlukan perhatian khusus dari sisi pengembangan produk lokal melalui inovasi, desain, kualitas produk yang dapat bersaing dalam pasar Nasional dan Internasional serta dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengukur program yang berkualitas.

Seorang Lukas Enembe putra pegunungan menjadi contoh karena dapat menkonstruksikan nilai-nilai humanis, khususnya masyarakat pegunungan dapat sejajar dengan masyarakat lainnya yang ada di Tanah Papua. Di dalam konsep perilaku/karakter budaya masyarakat Papua dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Papua Pesisir/pantai
2. Komunitas Rawa
3. Papua Lembah
4. Papua Pegunungan

Klasikasi tersebut mempengaruhi tatanan ruang kehidupan sosial pranata masyarakat Papua, sehingga Lukas Enembe selama 5 tahun terakhir di dalam kepemimpinannya mampu membuat program dengan pendekatan demensi kultur pada komunitas masyarakat sebagaimana

yang dikemukakan oleh Dr. Benny Giay. Di periode kepemimpinan Lukas Enembe dapat membangun ruang-ruang terbuka, seperti pembangunan pasar sektentasi pertemuan dengan masyarakat lainnya dan meligitimasi Papua Pegunungan seperti kebijakan Gubernur menghadirkan pasar Mama-mama Papua.

Dari analisa cost dan benefit, kebijakan pusat-pusat pasar sekgradasi, kebijakan ini dipandang kurang maksimal dari sisi pemanfaatannya, dikarenakan budaya eksklusivisme akan dijadikan muara konflik dalam kesenjangan sosial. Untuk memutus rantai kesenjangan antara pengembangan kebijakan infrastruktur masyarakat metropolis atau masyarakat komunal, bisa ditempuh melalui (1) Pola pembangunan dengan pendekatan budaya, hal ini dimaksudkan agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan tepat guna, dan menggunakan (2) Pola pembangunan ekonomi yang responsif, yaitu menggunakan pendekatan instruktur sebaya, hal ini dimaksudkan agar timbul kooperatif dimana rasa saling menghargai dan ada pembinaan, karena yang terjadi selama ini adalah pola ekonomi yang dibangun menggunakan system ekonomi subsider.

## 06 Pemberdayaan Masyarakat,

dengan meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan OAP adalah aspek penting dalam pembangunan di Papua. Ini dapat mencakup program pelatihan, pengembangan ekonomi lokal dan pemberian suara kepada komunitas dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan.

### Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Periode kedua pada masa kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP., M.H telah melakukan banyak perubahan dengan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan



# Dialog Dalam Rangka Mendorong Pembangunan Berkelanjutan Rendah Karbon di Provinsi Papua

**Bappeda** Provinsi Papua menggelar kegiatan dialog dalam rangka mendorong pembangunan berkelanjutan rendah karbon di Provinsi Papua. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (29/08/23) di hotel Fox Jayapura. Dihadiri oleh pejabat struktural di Bappeda, kepala kantor art/bpn wilayah Papua, para kepala SKPD dan juga tokoh akademis dari Universitas Cenderawasih, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura dan Universitas Muhammadiyah Jayapura serta mitra kerja pembangunan perlu diketahui bahwa pemerintah Provinsi Papua memiliki 5 (lima) kerangka baru untuk Papua yang merupakan desain baru dan rencana aksi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua. Salah satunya adalah dengan peningkatan dan pelestarian kualitas hidup dan peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon sesuai kearifan lokal, zona ekologis dan penataan ruang wilayah di pulau Papua dengan memperhatikan kearifan lokal.

Berdasarkan peraturan gubernur Papua no. 22 tahun 2018 tentang perencanaan pembangunan rendah karbon Provinsi Papua tahun 2018 – 2030 memiliki komitmen membentuk komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan provinsi serta memperkirakan dampaknya terhadap aspek lingkungan, sosial dan ekonomi di dalam rencana pembangunan Provinsi Papua. Maka dari itu dengan adanya forum dialog ini dapat menciptakan pandangan organisasi masyarakat sipil (mitra pembangunan dan lembaga swadaya masyarakat) dan pemerintah, sekaligus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat sipil. Melalui badan perencanaan pembangunan daerah, pemerintah Provinsi Papua dapat menjadi pihak



yang mengkoordinasikan kebijakan pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan rendah karbon.

Dalam kegiatan ini, pemerintah daerah berkolaborasi dengan mitra kerja pembangunan yakni USAID iwas tangguh yang diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan masukan terhadap revisi dokumen RKPDP Papua. Pada "temu interaktif kolaborasi percepatan pembangunan berkelanjutan Papua" yang digagas kemitraan bersama kementerian / lembaga pusat terkait, pemerintah Provinsi Papua dan kelompok masyarakat sipil di awal tahun ini merekomendasikan diadakannya rangkaian dialog terkait pembangunan berkelanjutan rendah karbon antar pemangku kepentingan di Papua.

Harapan dengan adanya kegiatan forum dialog ini adalah teridentifikasinya peran organisasi perangkat daerah dari sektor terkait dalam penyelarasan program/kegiatannya dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan rendah karbon, teridentifikasinya faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembangunan rendah karbon dan disepakatinya platform dan media yang dapat dipergunakan mendorong partisipasi aktif OPD terkait dan masyarakat umum dalam proses kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan rendah karbon di Provinsi Papua. (\*)

## ● Serba-serbi..



Integrasi Layering Dapodik.



Konsultasi Publik Dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).



Musrenbang Otsus 2023.



Musrenbangda Provinsi Papua.





• Serba-serbi..



Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) 2024-2026 & RKPD.



Rakortekda Provinsi Papua - Program kerjasama Pemerintah RI - UNICEF Periode 2021-2025.



Rapat forum penataan ruang (FPR) Permohonan rekomendasi kesesuaian perda no23 tahun 2013.



Bimtek Penggunaan Aplikasi e-Kinerja BKN.

• Serba-serbi..



Bimtek Penguatan Kapasitas Pemrov Papua & Kab-Kota dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis SIPD.



FGD Evaluasi Rencana Anggaran Program Penggunaan Penerimaan Dana Otsus Tahun 2024.



FGD implementasi dan tantangan inovasi Litbang.



Kegiatan Monitoring Meja Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Program & Kegiatan APBD.



• Serba-serbi..



Koordinasi Penyepakatan Daftar Data.



Pelatihan Monev Kolaborasi.



Pelatihan Penyusunan dan Pengelolaan Data Sektoral untuk 100 ASN Pemprov Papua.



Pembahasan FGD Evaluasi Rencana Anggaran Program Penggunaan Penerimaan Dana Otsus Tahun 2024.



• Serba-serbi..



Pembahasan Renja Tahun 2024.



Pembahasan Sio Papua, bersama Dinsos Prov Papua, Pokja IV Integrasi Data Kependudukan Daerah (IDKD) & SKALA.



Pembekalan Monitoring Meja.



Pendampingan Penyusunan Proposal Satuan Inovasi & Penginputan Indikator Indeks Inovasi Daerah.





• Serba-serbi..



Pertemuan Bappeda dan Mitra Pembangunan, dalam rangka pembahasan program kerja NGO.



Rakor Manajemen Daerah (Rakormanda) Provinsi Papua tahun 2023, Program kerjasama Pemerintah RI-UNICEF Periode Tahun 2021-2025.



Rapat Kesiadaan Data OAP.



Rapat Koordinasi TPPS Stunting.



• Serba-serbi..



Rapat Persiapan Pembahasan Renja OPD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024.



Rapat Persiapan RKA Perubahan.



Rembuk Stunting dan Penilaian Kerja.



Seminar Akhir Identifikasi Perubahan Bentang Alam Akibat Penambangan Batu Gamping Di Kab Biak Numfor.





● Serba-serbi..



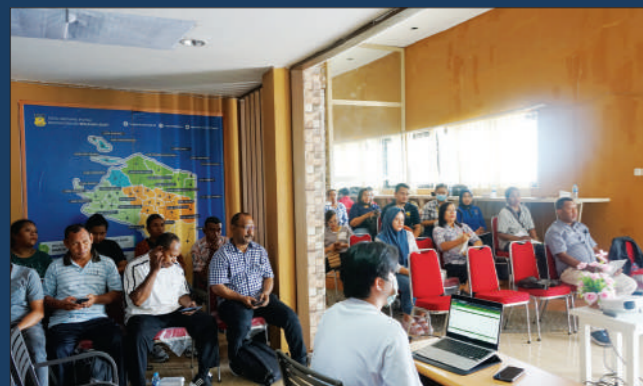
Pelaksanaan Rapat Pra Rakortekrenbang Provinsi.



Penancangan Pembangunan Zona Integritas BPS.



Penguatan Forum Data Provinsi Papua.



Penyepakatan Daftar Data.



● Serba-serbi..



Sosialisasi Arah Kebijakan DAK Kab-Kota dalam rangka Identifikasi & Analisis Usulan DAK Kab-Kota.



Rapat Koordinasi Papua Integrasi Satu Data (PAITUA).



FGD RAD SDGs Provinsi Papua Tahun 2024-2029 Bagi OPD Se-Provinsi Papua.







**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**



**PUSDALISBANG  
BAPPEDA PROVINSI PAPUA**  
Sie. Pelayanan Informasi & Komunikasi